

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara model koalisi di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dilihat dari persamaannya yaitu *Pertama*, keduanya diusung oleh partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan/mayoritas sebesar 20 persen di parlemen. Karena hasil suara lebih merata antara partai politik yang menyebabkan diperlukannya koalisi. *Kedua*, model koalisi yang digunakan adalah model koalisi besar di dalam pemerintahan, meskipun Joko Widodo di awal pemerintahan menggunakan model koalisi ramping yang berbeda dengan Susilo Bambang Yudoyono yang dari awal pemerintahannya menggunakan model koalisi besar selama dua periode. *Ketiga*, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menjadi presiden yang lunak-akomodatif karena dipengaruhi oleh model koalisi yang dibentuknya dimana keduanya harus berbagi kursi jabatan di pemerintahan. Di samping adanya persamaan, ada beberapa perbedaan antara keduanya. *Pertama*, posisi jabatan di partai politik yang mengusungnya, kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selaku ketua umum di Partai Demokrat yang mengusung dirinya, sedangkan Joko Widodo hanya seorang kader Partai PDIP yang mengusungnya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi di dalam mengatur komunikasi antara

anggota partai politik koalisi. *Kedua*, di dalam jalannya koalisi antara keduanya, lebih sedikit manuver yang dilakukan oleh anggota partai koalisi dari Joko Widodo, sedangkan pada koalisi dua periode Susilo Bambang Yudhoyono banyak terjadi manuver yang dilakukan partai anggota koalisinya atau dapat dikatakan Joko Widodo lebih mampu untuk menenangkan konflik politik yang timbul pada masa pemerintahannya.

Saran

Saran untuk pemerintah, dan partai politik

1. Menyederhanakan jumlah partai, dengan melihat sistem ketatanegaraan, sistem kepartaian pluralisme moderat yang jumlahnya 5-7 partai politik, dirasa cukup dan *compatible* dengan bentuk sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.
2. Reformasi karakter partai politik, dari partai politik pragmatis dan berorientasi jangka pendek menjadi partai politik yang memiliki *platform* politik dan visi kebangsaan yang jelas.
3. Pembentukan koalisi partai politik yang permanen dengan dasar *platform* politik dan visi kebangsaan yang jelas agar dapat membuat pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan lama.